

DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN INTOLERANSI DI SEKOLAH

Jan Purba¹, Jonathan Purba², Ripael Panjaitan³, Sandri Sinaga⁴, Andhika Sinulingga⁵, Kevin Pakpahan⁶, Prini Ambarita⁷

Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
E-mail: ardo1012006@gmail.com¹

ABSTRAK

Fenomena intoleransi yang mengemuka di lingkungan sekolah menunjukkan adanya tantangan serius dalam proses pendidikan karakter kebangsaan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keberagaman sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang beradab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam merespons tantangan intoleransi di sekolah melalui pendekatan studi pustaka. Analisis dilakukan terhadap berbagai literatur akademik, kebijakan kurikulum, serta hasil penelitian sebelumnya terkait pendidikan toleransi, multikulturalisme, dan kewarganegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun nilai toleransi telah tercantum dalam kurikulum PKn, implementasinya sering kali tidak maksimal karena pendekatan pembelajaran yang normatif, keterbatasan kompetensi guru, serta pengaruh kuat lingkungan sosial dan media terhadap peserta didik. Selain itu, strategi sekolah dalam menanamkan nilai toleransi cenderung bersifat simbolik dan belum menjadi bagian dari sistem pembelajaran yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum, pelatihan guru, dan pengembangan budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai kebhinekaan secara konsisten.

Kata kunci

Pendidikan Kewarganegaraan, Intoleransi, Toleransi, Studi Pustaka, Keberagaman Sekolah

ABSTRACT

The phenomenon of intolerance that has emerged in the school environment indicates a serious challenge in the process of national character education. Citizenship Education (PKn) has a strategic role in instilling the values of tolerance, democracy, and diversity as part of the formation of civilized citizens. This study aims to examine the dynamics of the implementation of Citizenship Education in responding to the challenges of intolerance in schools through a literature study approach. Analysis was carried out on various academic literature, curriculum policies, and previous research results related to tolerance, multiculturalism, and citizenship education. The results of the study show that although the value of tolerance has been included in the PKn curriculum, its implementation is often not optimal due to the normative learning approach, limited teacher competence, and the strong influence of the social environment and media on students. In addition, the school's strategy in instilling the value of tolerance tends to be symbolic and has not become part of a comprehensive learning system. Therefore, it is necessary to strengthen the curriculum, teacher training, and develop a school culture that consistently supports the values of diversity.

Keywords

Citizenship Education, Intolerance, Tolerance, Literature Study, Diversity School

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu instrumen strategis dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, toleran, dan menjunjung tinggi keberagaman. Dalam konteks Indonesia yang majemuk secara etnis, agama, dan budaya, pendidikan ini memiliki tanggung jawab moral untuk membina generasi muda agar mampu hidup berdampingan dalam harmoni. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa intoleransi masih menjadi persoalan serius, termasuk di lingkungan sekolah. Berbagai laporan dan kajian menunjukkan adanya peningkatan sikap eksklusif, diskriminatif, bahkan tindakan kekerasan yang berakar dari ketidakmampuan memahami dan menghargai perbedaan.

Berbagai penelitian sebelumnya, baik nasional maupun internasional, telah menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai toleransi dalam pendidikan. Sayangnya, dalam praktiknya, Pendidikan Kewarganegaraan sering kali terjebak dalam pendekatan kognitif semata dan kurang menyentuh dimensi afektif dan konatif siswa. Hal ini menimbulkan pertanyaan reflektif: sejauh mana PKn telah mampu menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan intoleransi di sekolah?. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yakni dengan menelaah berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, kebijakan pendidikan, serta laporan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk mengkaji dinamika pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam merespons tantangan intoleransi, serta merumuskan strategi penguatan nilai toleransi dalam kerangka pembelajaran PKn. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman konseptual dan kontekstual yang lebih luas sebagai kontribusi terhadap pengembangan pendidikan yang inklusif dan humanis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam literatur-literatur akademik yang relevan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dan perannya dalam menghadapi tantangan intoleransi di sekolah. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang kredibel. Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan pendidikan, hasil penelitian sebelumnya, serta laporan lembaga resmi seperti Kemendikbudristek, UNESCO, dan LIPI. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mensintesis gagasan-gagasan utama yang berkaitan dengan dinamika pendidikan kewarganegaraan dan isu intoleransi dalam konteks pendidikan.

Pemilihan literatur dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung sumber dengan topik penelitian. Proses analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan-temuan literatur ke dalam tema-tema utama, seperti integrasi nilai toleransi dalam pembelajaran PKn, kompetensi guru dalam mengelola keberagaman, pengaruh lingkungan sosial terhadap siswa, dan strategi sekolah dalam membangun budaya toleransi. Hasil dari telaah pustaka ini kemudian menjadi dasar dalam menyusun pembahasan dan kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kurikulum PKn dan Tantangan Integrasi Nilai Toleransi.

Kajian terhadap kurikulum nasional menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan telah memuat nilai-nilai dasar toleransi, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengakuan atas keberagaman budaya, serta pentingnya dialog dalam kehidupan bernegara. Namun, beberapa penelitian mengungkap bahwa kurikulum sering tidak diterjemahkan secara efektif ke dalam proses pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Banks (2008) dan Winataputra (2006), pembelajaran PKn cenderung menekankan pada hafalan konsep, bukan pada pengembangan sikap atau kemampuan berinteraksi dalam masyarakat yang majemuk. Studi oleh Tilaar (2004) menunjukkan bahwa pembelajaran nilai harus dikaitkan dengan realitas sosial siswa agar lebih membumi dan kontekstual. Dalam hal ini, integrasi isu-isu intoleransi ke dalam pembelajaran PKn masih belum optimal. Guru membutuhkan dukungan kurikulum yang fleksibel dan responsif agar dapat mengangkat kasus nyata dan membuka ruang diskusi reflektif di kelas.

Lebih lanjut, berbagai literatur menekankan pentingnya pendekatan pedagogi kritis dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan ini tidak hanya membekali siswa dengan informasi, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis ketimpangan sosial, memahami posisi dirinya sebagai warga negara, dan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya keberagaman dan keadilan.

3.2 Kompetensi Guru sebagai Faktor Penentu.

Studi pustaka dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi guru merupakan faktor kunci dalam efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan. Moleong (2019) dan Muhaimin (2011) menyebut bahwa guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai model nilai dan fasilitator dialog yang humanis. Sayangnya, masih banyak guru yang belum dibekali pelatihan tentang pendidikan multikultural, anti-diskriminasi, atau pengelolaan kelas yang beragam secara identitas. Menurut Azra (2017), pemahaman keagamaan atau ideologi guru juga bisa mempengaruhi cara mereka mengajarkan toleransi. Jika tidak ada standar kompetensi atau panduan profesional yang jelas, maka bisa terjadi bias dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan temuan Wahid (2018) yang menyoroti adanya infiltrasi paham intoleran dalam beberapa lingkungan pendidikan yang kurang memiliki sistem pengawasan nilai.

Literatur juga menunjukkan pentingnya pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Program pelatihan yang berfokus pada pendekatan pembelajaran yang berbasis dialog, simulasi sosial, dan studi kasus keberagaman perlu dikembangkan dan dilembagakan secara sistemik agar guru mampu menjadi agen transformasi sosial di sekolah.

3.3 Pengaruh Lingkungan Sosial dan Media terhadap Siswa.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intoleransi tidak semata tumbuh di ruang kelas, tetapi juga diperkuat oleh lingkungan sosial siswa, terutama media sosial dan komunitas. Banks (2008) mengingatkan bahwa pendidikan formal sering kalah pengaruh dibandingkan lingkungan pergaulan yang menjadi sumber nilai alternatif. Dalam konteks ini, PKn menghadapi tantangan berat untuk bersaing dengan arus informasi digital yang tidak selalu mendukung nilai toleransi. Literatur dari Wahid (2018) dan Tilaar (2004) menggarisbawahi bahwa siswa yang hidup dalam komunitas homogen, tertutup, atau sangat konservatif lebih berisiko menyerap pandangan eksklusif. Sementara itu, paparan informasi yang bersifat provokatif atau hoaks di media sosial juga turut memengaruhi

persepsi mereka terhadap kelompok lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan toleransi harus bersifat intersektoral dan melibatkan kerja sama lintas pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan, hal ini menegaskan perlunya membekali siswa dengan kemampuan literasi digital dan literasi sosial. Mereka harus mampu membedakan informasi yang membangun nilai kebangsaan dari narasi-narasi yang memecah belah. Oleh karena itu, PKn tidak hanya bicara tentang kewarganegaraan secara normatif, tetapi juga harus responsif terhadap perkembangan zaman.

3.4 Strategi Sekolah dalam Membangun Budaya Toleransi

Literatur mengindikasikan bahwa sekolah memiliki peran sentral sebagai agen sosialisasi nilai-nilai kebhinekaan. Namun, banyak kajian menyebutkan bahwa upaya sekolah masih bersifat simbolik dan tidak terintegrasi dalam kebijakan internal maupun budaya kelembagaan. Program-program seperti "Hari Toleransi", upacara bendera bertema keberagaman, atau pelatihan karakter seringkali hanya menjadi rutinitas formal yang minim refleksi nilai.

Menurut Winataputra (2006) dan Banks (2008), pembentukan budaya toleransi di sekolah memerlukan pendekatan sistemik. Ini mencakup pengembangan kurikulum sekolah yang inklusif, kebijakan anti-diskriminasi yang jelas, serta pembiasaan nilai melalui kegiatan keseharian. Sekolah harus menciptakan lingkungan di mana keberagaman tidak hanya diterima, tetapi dirayakan.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah perlu membangun ekosistem yang konsisten dalam menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan toleransi, mulai dari materi pelajaran, cara guru mengajar, hingga relasi antarwarga sekolah. Tanpa strategi yang menyeluruh, nilai-nilai dalam PKn akan sulit terinternalisasi secara utuh oleh peserta didik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi penting dalam menghadapi tantangan intoleransi di lingkungan sekolah. Nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan multikulturalisme telah menjadi bagian dari kerangka kurikulum nasional. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik pembelajaran masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi metode pengajaran konvensional, keterbatasan wawasan guru terhadap pendidikan multikultural, serta minimnya pendekatan yang berbasis pengalaman dan dialog. Selain itu, lingkungan sosial siswa, termasuk media sosial dan komunitas, memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap intoleran yang sering kali tidak dapat diimbangi oleh pendidikan formal. Strategi-strategi sekolah dalam membangun budaya toleransi juga belum terintegrasi secara sistemik dalam kebijakan maupun aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat pendidikan toleransi dalam PKn melalui pendekatan kurikulum yang lebih kontekstual, pelatihan guru yang berorientasi pada pedagogi inklusif, serta kerja sama lintas sektor dalam membangun ekosistem pendidikan yang menghargai keberagaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2017). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.
- Banks, J. (2008). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Moleong, L. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Wahid, Y. (2018). Radikalisme di Dunia Pendidikan: Sebuah Refleksi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(1), 1-10.
- Winaputra, U. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional*. Jakarta: Universitas Terbuka.